KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Sekjen DPR Tunggu Permintaan Kementrian Kesehatan
Tanggal : Senin, 12 Juli 2021
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Sekjen DPR Tunggu Permintaan Kementerian Kesehatan

Ketua MPR Beri

... DARI HALAMAN 1

perangkat lainnya seperti organisasi kemasyarakatan. Sehingga RS Darurat itu bisa segera difungsikan. "Sehingga bisa membantu para saudara sebangsa yang terkena musibah Covid-19," ucapnya, dalam Rapat Koordinasi Virtual FKPPI, Sabtu (10/7).

Wakil Ketua MPR Syarief Hasan juga mendukung usulan penggunaan halaman dan Gedung DPR/MPR/DPD sebagai RS Darurat. Menurut dia, saat ini rumah sakit yang ada di Jabodetabek sudah tidak bisa menampung pasien Corona yang terus membludak. RS sudah kolaps. Banyak pasien tidak mendapatkan kamar. Bahkan, ada beberapa kasus pasien gejala berat yang meninggal dunia karena terlambat tertolong akibat kapasitas RS yang sudah penuh.

Menurut eks Menteri Koperasi dan UKM ini, tugas anggota DPR tak akan terganggu dengan adanya RS Darurat itu. Apalagi saat ini banyak rapat yang digelar secara daring alias online. "Bahkan, pelaksanaan tugas dan fungsi DPR akan semakin terlihat dengan turun ke lapangan dan dengan adanya RS Darurat tersebut," jelasnya.

Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR Herman Khaeron juga memberikan dukungan. Kata dia, Gedung DPR cukup memadai untuk dijadikan sebagai RS Darurat.

"Saya setuju. Setiap fasilitas publik yang memadai untuk dijadikan RS Darurat, dengan kondisi mendesak ini, harus dibuka. Tidak terkecuali DPR," ucap salah satu orang kepercayaan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini, kepada *Rakyat Merdeka*, tadi malam.

Menurut politisi asal Cirebon, Jawa Barat ini, membuat RS Darurat di Gedung DPR tidak terlalu sulit. Cukup menyediakan standar kebutuhan di fasilitas kesehatan. Seperti ada ruang *intensive care unit* (ICU), ruang rawat inap, dan tempat tidur memadai. Jika DPR dijadikan RS Darurat, akan ada ketersediaan kamar baru yang memadai. Dengan begitu, masalah RS penuh bisa teratasi.

"Contoh, Asrama Haji bisa ada 900 bed. Kalau di DPR, bisa 1.000 bed. Itu bisa membantu juga," imbuhnya.

Tentunya, tambah Herman, harus dibarengi dengan penyediaan tenaga kesehatan yang memadai juga. Jangan sampai ruangan ada, tenaga kesehatan kekurangan. "Ini harus dikoordinasikan dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes)," tandasnya.

Politisi PKS Mardani Ali Sera juga mendukung. Kata dia, usulan itu mencerminkan DPR peduli dengan rakyat yang sedang susah. Menurut dia, Gedung DPR memiliki segala sumber daya, tempat yang luas, strategis, dan mudah dijangkau. Terlebih, saat pandemi begini, kehadiran anggota parlemen di Gedung DPR sangat dibatasi.

Sementara itu, Sekjen DPR Indra Iskandar masih menunggu perkembangan. Kalau memang ada permintaan dari Kemenkes, pihaknya siap membantu. "Prinsipnya, kami siap bantu fasilitasi," kata Indra, kemarin

Namun, untuk menjadikan Gedung DPR sebagai RS Darurat tidak bisa sembarangan. Indra menyebut, ada syarat dan alat yang harus disiapkan terlebih dahulu. "Karena tentu ada prasyarat kan, listrik, air tenda dengan pendingin udara dan lainnya," ucapnya. ■ BCG